



Buletin Parlementaria

Nomor 1053/II/V/2019 • Mei 2019



DPR dan Pemerintah Komitmen Selesaikan RUU Prolegnas



4 Komisi I Kutuk
Serangan di Palestina



7 Negara Bertanggung
Jawab Atas Meninggalnya
Pejuang Demokrasi



9 772614 339005

DPR dan Pemerintah Komitmen Selesaikan RUU Prolegnas



Suasana Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, DPR RI bersama dengan pemerintah berkomitmen akan menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yakni 34 RUU yang masih tahap pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR RI, pemerintah, maupun yang datang dari DPD RI.

“Kita optimistis, dengan komitmen bersama tersebut, Insya Allah akan lebih mudah untuk menyelesaikan RUU yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat,” kata Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018–2019, di hadapan Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5). Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Bamsuet menambahkan, beberapa RUU yang mendesak untuk diselesaikan

antara lain; RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan RUU tentang Ekonomi Kreatif. “Di samping itu masih ada beberapa RUU yang macet pembahasannya lantaran pemerintah sampai saat ini tidak menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM),” imbuh Bamsuet.

Sementara di bidang anggaran,



masih kata Bamsuet, pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah akan melakukan pembicaraan pendahuluan berkaitan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2020 yang akan menjadi landasan dalam menyusun asumsi dasar perhitungan anggaran tahun 2020. DPR RI berharap agar pembahasan ini akan menghasilkan asumsi dasar ekonomi makro yang mendekati kondisi riil perekonomian saat ini.

“Di bidang pengawasan, DPR meminta pemerintah untuk memastikan agar kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Puasa dan Lebaran tetap tersedia dengan harga yang stabil. Jika terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut dengan mengeruk keuntungan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat, hendaknya diambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Bamsuet menambahkan, masih terkait dengan fungsi pengawasan, DPR RI akan menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Hakim Agung dan calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2019–2024. Pimpinan DPR RI kembali berharap agar semua proses dilakukan secara transparan dan efektif serta diselesaikan pada masa persidangan ini. Selain itu, DPR RI juga akan memberi pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari negara-negara sahabat.

“Berkenaan dengan gagasan pemindahan ibu kota yang dikembangkan oleh pemerintah, Pimpinan DPR meminta pemerintah untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dengan melibatkan berbagai kalangan secara luas. Pada saatnya DPR akan melakukan evaluasi apakah gagasan tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan,” pesan legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Mengenai pelaksanaan tugas Panitia Kerja yang dibentuk melalui Alat Kelengkapan Dewan, Tim

Pemantau, dan Tim Pengawas DPR RI, Pimpinan Dewan meminta agar segera menyelesaikan tugasnya di sisa waktu kerja yang tersedia serta menyampaikan laporan akhir di dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang. Sehingga, waktu yang ada bisa lebih banyak untuk bekerja menjalankan fungsi legislasi.

“DPR terus berupaya meningkatkan peran diplomasi parlemen guna memberikan sumbangan yang berarti

”

DPR TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN PERAN DIPLOMASI PARLEMEN GUNA MEMBERIKAN SUMBANGAN YANG BERARTI BAGI PENINGKATAN DIPLOMASI INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL.

bagi peningkatan diplomasi Indonesia di dunia internasional. Untuk itu, DPR akan terus mengirim delegasi guna menghadiri pertemuan, sidang atau konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Organisasi Internasional,” jelas Bamsuet.

Bamsuet menambahkan, berkenaan dengan kunjungan Presiden RI ke Arab Saudi baru-baru ini, DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah nyata diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan tambahan 10 ribu kuota jemaah Haji untuk Indonesia.

“Hal ini merupakan kabar baik bagi para calon jemaah Haji Indonesia, sehingga akan memperkecil jemaah yang mengalami antrian yang sangat lama. Untuk itu, Pimpinan DPR meminta komisi terkait agar segera melakukan pembicaraan dengan Kementerian teknis guna mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan penambahan kuota tersebut,” pesan Bamsuet. ■ sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga

Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya

Armanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen,

Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi,

Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan

Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti

Nadiyah, Rivan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa

Armanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naeufuroji, M. Andri Nurdiansyah

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,

Geraldi Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,

Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nuraini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Pusputa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Komisi I Kutuk Serangan di Palestina

Israel kembali menodai bulan suci Ramadan. Bukan hanya membunuh warga Palestina di Gaza, namun juga melukai seluruh umat Muslim dunia dengan serangan brutalnya kepada warga Gaza yang telah menyahidkan puluhan warga Gaza, perempuan, anak-anak, serta menghancurkan bangunan kantor media, relawan kemanusiaan dan pemukiman warga Gaza, Palestina.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk tindakan biadab zionis Israel terhadap umat Islam Palestina di Gaza yang tidak bersalah. Kharis meminta dunia, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB agar memberikan perlindungan kepada Umat Islam di Palestina.

“Saya meminta Indonesia yang menjabat sebagai Presiden DK PBB untuk satu bulan ke depan mengambil tindakan dengan menyeret Israel ke pengadilan internasional atas pembunuhan terhadap warga Gaza. Jangan posisi DK PBB hanya aksesoris saja perjuangkan kemerdekaan Palestina di dalam bulan Ramadan ini,” tegas Kharis dalam keterangan tertulis kepada *Parlementaria*, Rabu (8/5).

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini, gencatan senjata yang disepakati antara Hamas dan Israel hanya menghentikan sementara kejahatan zionis, perlu langkah berani Indonesia dan bersama-sama negara Muslim dunia untuk menghentikan semua kekerasan, kebrutalan, kekejaman dan ketidakadilan di Palestina yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan Israel.

“Indonesia mendukung gencatan senjata di Gaza, namun perlu diingat bumi Palestina belum sepenuhnya



Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Foto: Rizka/hr

”

...NAMUN PERLU DIINGAT BUMI PALESTINA BELUM SEPENUHNYA TERBEBAS DARI PENJAJAHAN ZIONIS ISRAEL YANG MEREKA DAPAT SETIAP WAKTU DENGAN SEENAKNYA MEMBUNUH DAN MEMBANTAI SAUDARA KITA MUSLIM PALESTINA.

terbebas dari penjajahan zionis Israel yang mereka dapat setiap waktu dengan seenaknya membunuh dan membantai saudara kita muslim Palestina. Langkah nyata perlu segera dilakukan selagi Indonesia masih menduduki posisi

penting dalam Dewan Keamanan PBB,” tegas Kharis.

Situasi di zona perbatasan Gaza-Israel telah memanas sejak Maret 2018, tepatnya ketika warga Palestina menggelar aksi bertajuk Great March of Return alias Gerakan Pulang Akbar. Anggota DPR RI dapil Jawa Tengah V ini memastikan Indonesia akan selalu bersama Palestina membela perjuangan rakyat Palestina, hingga tidak ada lagi penjajahan di atas muka bumi.

“Buka Blokade terhadap Gaza, kekerasan yang terus dipertontonkan Israel terhadap orang-orang tak bersalah adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena itu, Indonesia akan terus membela rakyat Palestina sesuai amanah konstitusi dan sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Merdeka untuk Palestina!” pungkas Kharis. ■ *er/sf*

DPR Desak Pemerintah Lebih Vokal Advokasi Serangan Israel di Gaza



Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Jaka/hr

”

...INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG SECARA KONSTITUSIONALNYA MENENTANG PENJAJAHAN, HARUS TERUS MENYUARAKAN DAN MENGADVOKASI SUPAYA AGRESI TERSEBUT SEGERA DIHENTIKAN.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengutuk serangan yang dilakukan Israel terhadap warga negara Palestina di wilayah Gaza hingga menyebabkan jatuhnya korban wanita, anak-anak, dan ibu hamil. Bahkan, serangan ini dilancarkan di tengah Bulan Suci Ramadan, dimana umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa. Sukamta mendesak Pemerintah Indonesia untuk lebih vokal mengadvokasi atas serangan yang dilakukan Israel itu.

“Ini adalah satu-satunya penjajahan yang masih berlangsung di muka bumi. Di dunia manapun (hal) ini tidak dibenarkan dan tidak boleh terjadi. Tetapi justru hari-hari ini dunia diam. Bahkan negara besar, dedengkot demokrasi, negara adidaya, Presidennya mengatakan mendukung seratus persen

serangan tersebut,” tandas Sukamta dalam interupsinya saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Sukamta menyampaikan, Indonesia sebagai negara yang secara konstitusionalnya menentang penjajahan, harus terus menyuarakan dan mengadvokasi supaya agresi tersebut segera dihentikan. “Kita bukan hanya meminta kepada negara agresor untuk menghentikan serangan itu, tetapi negara besar yang menjadi suporternya harus juga diingatkan oleh Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, tidak ada serangan yang menimbulkan korban wanita, anak-anak, dan ibu hamil tetapi justru didukung penuh dan diiyakan oleh sebuah negara besar. Padahal kalau satu orang saja dari warga negara mereka

menjadi korban, mereka langsung menurunkan tentara untuk membelanya.

“Sekarang yang justru yang menjadi korban adalah wanita, anak-anak, dan ibu hamil, tetapi serangan itu didukung seratus persen oleh negara adidaya. Oleh karenanya DPR RI perlu mendorong dan mendesak pemerintah untuk lebih vokal lagi dalam mengadvokasi,” tegas legislator dapil DI Yogyakarta itu.

Pada kesempatan tersebut, Sukamta juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban dari petugas penyelenggara Pemilu yang jumlahnya cukup besar. “Ini adalah korban yang sangat luar biasa. Mestinya sistem kita ke depan harus bisa mencegah jatuhnya korban dari petugas-petugas Pemilu yang seharusnya tidak perlu terjadi,” tegasnya. ■ dep/sf

Bachtiar Aly Minta Wiranto Lakukan Cara Persuasif Benahi Medsos



Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Aly. Foto: Jaka/hr

Anggota Komisi I DPR RI Bachtiar Aly menanggapi isu beredar yang diucapkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Wiranto terkait akan menutup akun media sosial (medsos) yang memuat konten inkonstitusional dan pelanggaran hukum. Ia menyayangkan pemilihan kosakata yang digunakan oleh Wiranto dalam menanggapi isu yang panas tersebut.

“Sudah sangat tidak populer kata mengancam menutup atau membombardir di masa ini, karena itu sudah mengarah kepada otoriter lagi. Jadi menurut saya sudah tidak seperti itu. Kita sekarang sudah harus berjiwa besar. Kita tahu saat ini banyak tersebar berita bohong dan sebagainya. Jadi berita model seperti ini lama kelamaan kita akan paham sendirinya,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

”

SUDAH SANGAT TIDAK POPULAR KATA MENGANCAM MENUTUP ATAU MEMBOMBARDIR DI MASA INI, KARENA ITU SUDAH MENGARAH KEPADA OTORITER LAGI.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menganggap apa yang diucapkan Wiranto menjadi tidak bijak terlebih posisinya adalah Menteri Koordinator pada saat mengucapkannya. Bachtiar sendiri mendorong agar Menkopolhukam lebih mengutamakan langkah persuasif karena memang seperti itu cara negara Indonesia hidup saat ini. Menurutnya,

dengan menutup semua medsos belum tentu menjadi lebih baik.

“Justru yang harus kita lakukan pemerintah dengan *stakeholder*, tokoh pers, para pakar yang pandai mengenai komunikasi jurnalistik itu duduk bersama. Bagaimana kita mendesain kembali supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat kita, dan berkebutuhan dengan integritas nasional kita bahwa rakyat media dan pemerintah itu harus bersatu,” ucapnya.

Ia menyadari betul bahwa media merupakan salah satu kekuatan penting setelah trias politika, sehingga seharusnya pemerintah dapat merangkul kekuatan tersebut. Menurutnya yang harus diboikot adalah media yang salah arah yang ingin menjadi berbeda, tetapi melakukan langkah-langkah negatif yang dapat memecah belah Bangsa Indonesia.

“Rakyat bersama pemerintah justru harus memboikot (media salah arah) itu. Jangan kasih angin kepada hoaks, jangan kasih peluang buat media yang mau tampil beda tetapi caranya salah. Yang kita perlukan saat ini adalah semua media pemerintah, DPR, itu harus bersatu padu menjaga integritas Indonesia,” tegas Bachtiar.

Untuk itu secara tegas politisi dicalonkan Aceh I ini mendorong pemerintah agar tidak hanya menjadi pemadam kebakaran atau bekerja ketika ada masalah saja. “Jangan memulai pekerjaan *by accident* akan tetapi *by design*. Kita harus rancang itu betul-betul kemana arah yang kita mau untuk membuat kedaulatan dan keberimbangan bagi media,” pungkasnya. ■ es/sf

Negara Bertanggung Jawab Atas Meninggalnya Pejuang Demokrasi

Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah dilaksanakan dengan sukses. Namun dibalik kesuksesan tersebut menyimpan berita duka yang cukup mendalam. Hingga berita ini diturunkan, tak kurang dari 554 orang petugas pemilu yang terdiri dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas (Panwas) serta unsur pengamanan dari Polri meninggal dunia.

”

KELUARGA YANG DITINGGALKAN SEKIRANYA DIBERIKAN SANTUNAN, BAHKAN KALAU PERLU ANAK-ANAKNYA DIANGKAT JADI ANAK NEGARA YANG DIJAMIN KEHIDUPANNYA HINGGA KULIAH.

“Satu orang meninggal pun merupakan bencana, apalagi ini mencapai 500 orang. Ini adalah sebuah bencana nasional, demokrasi kita tidak sebanding dengan korban jiwa. Kita semua harus bertanggung jawab, baik kami di DPR maupun juga pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat ditemui sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Politisi F-PKS ini menganggap



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Odjie/hr

mereka yang meninggal akibat kelelahan dalam mengawal Pemilu serentak ini pejuang demokrasi. Kejadian menurutnya akan menjadi titik awal evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Tentu tidak serta merta evaluasi tersebut membuat perubahan pada Pemilu di masa mendatang. Melainkan mencari di mana letak kesalahan bukan mencari siapa yang salah.

Pengorbanan para pejuang demokrasi ini, menurutnya harus mendapat apresiasi. “Keluarga yang ditinggalkan sekiranya diberikan santunan, bahkan kalau perlu anak-anaknya diangkat jadi anak negara yang dijamin kehidupannya hingga kuliah. Mengingat orang tua mereka adalah pejuang demokrasi,” saran Mardani.

Mardani mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara detail identitas pejuang demokrasi yang meninggal dunia berikut penyebabnya. “Siapa dia, lelaki atau perempuan kah dia, sebab sakitnya apa, keluarganya seperti apa, tugasnya di TPS atau di kecamatan, termasuk juga apa harapan-harapan dari keluarga mereka,” pinta Mardani.

Dalam melakukan pendataan terhadap pejuang demokrasi yang meninggal, politisi dapil Jawa Barat VII ini menyarankan agar KPU membuat buku putih daftar korban, kronologis meninggalnya, termasuk juga riwayat penyakitnya. Hal tersebut penting guna mengetahui penyebab meninggalnya karena kelelahan atau dikarenakan sakit lainnya. ■ es/sf

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Sembako

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menstabilkan harga sembako saat Ramadan. Menurutnya, hal ini merupakan masalah tahunan yang wajar karena memasuki puasa hingga menjelang Lebaran kebutuhan dan konsumsi masyarakat terhadap pangan meningkat.

“Kenaikan harga seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah dan petani, jika menjelang bulan Ramadan maka kebutuhan-kebutuhan pangan sudah disiapkan oleh mereka. Sehingga pada saat seperti sekarang ini tidak mengganggu psikologis pasar kita,” ujar Rahmad sesuai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).



GUNA MENSTABILKAN KENAIKAN HARGA, OPERASI PASAR DINILAI MENJADI SOLUSI. TIDAK HANYA ITU, DIBUKANYA KERAN IMPOR JUGA DAPAT MENJADI JALAN TENGAH MENGATASI PERMASALAHAN INI.

Ia menilai, pembentukan Satgas Pangan dinilai perlu untuk dibentuk guna memastikan tidak adanya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun stok berlebihan. “Kartel itu dilarang. Maka perlu ada penegakan hukum, tanpa itu tidak akan efek jera bagi pelaku. Maka berhati-



Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Andri/hr

hatilah bagi pelaku usaha pangan kita, jangan sekali-kali melakukan penimbunan di saat-saat seperti ini karena itu pidana,” tegas Rahmad.

Guna menstabilkan kenaikan harga, operasi pasar dinilai menjadi solusi. Tidak hanya itu, dibukanya keran impor juga dapat menjadi jalan tengah mengatasi permasalahan ini. Menurut politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, impor bisa dilakukan jika memang diperlukan, tetapi waktunya harus tepat dan harus bisa melindungi para petani.

“Impor itu adalah amanah rakyat. Impor adalah amanah Undang-Undang, dibolehkan dengan catatan, misalnya ketika stok pangan kita tidak ada atau menipis, harga-harga melambung sementara produksi kita belum siap

untuk distribusikan karena belum panen. Misalnya bawang putih, 90 persen itu kita belum cocok untuk menanam itu sehingga kita harus impor,” ujarnya

Diketahui, harga sejumlah bahan pangan meningkat pada hari pertama dan kedua Ramadan. Tercatat dalam Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga bawang putih melonjak dari Rp 49.750/kg menjadi Rp 61.550/kg saat memasuki bulan puasa. Harga tertinggi terjadi di Pasar Pramuka yang mencapai Rp 90.000/kg. Sementara harga cabai rawit hijau melonjak dari Rp 37.300/kg ke Rp 41.700/kg dengan harga tertinggi di Gorontalo yang mencapai Rp 115.000/kg. ■ alw/sf

Perluasan Bandara Frans Seda Maumere Terkendala Lahan

Bandar Udara Frans Seda Maumere yang terletak di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditargetkan pada tahun 2020 bisa naik kelas menjadi bandara kelas A yang bisa dilewati pesawat berbadan lebar. Dengan perluasan bandara tersebut diharapkan bisa mempercepat pembangunan serta menarik investor dan wisatawan asing datang ke Maumere. Namun perluasan bandara itu terkendala lahan.

“Bandara Frans Seda Maumere ini nantinya bisa diubah menjadi bandara terbesar di NTT setelah Eltari Kupang, namun masih terkendala lahan,” tutur Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Bandara Frans Seda Maumere di Sikka, NTT, Jumat (3/5).

Politisi Partai Gerindra tersebut menuturkan kendala yang dihadapi untuk memperlebar bandara antara lain terbenturnya lahan apabila diperpanjang *runway*-nya langsung berhadapan jalan nasional dan perbukitan apabila diperlebar ke arah selatan. “Itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Sikka terkait perpanjangan runway. Komisi V siap mendukung dan mengusulkan ke pemerintah” tutur Fary.

Sementara itu Anggota Komisi V DPR RI Saniatul Lativa berpendapat dari usulan anggaran Kabupaten Sikka untuk perluasan bandara yang mencapai lebih dari Rp 90 miliar tersebut bisa langsung diusulkan ke Komisi V DPR RI, yang nantinya akan dibahas dalam rapat bersama mitra kerja.

“Kami sangat mendukung sekali terkait pengembangan bandara ini. Masyarakat masih sangat mengandalkan

pesawat untuk menjangkau antar daerah di NTT. Tinggal pemerintah kabupaten menyiapkan pembebasan lahan dan dipastikan tidak ada masalah dengan pemilik lahan nantinya,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Hal yang serupa juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Alen Marbun. Terkait dukungan perluasan Bandara Frans Seda, ia menegaskan bahwa pembebasan lahan harus benar-benar tidak ada masalah dan pemilik lahan juga harus benar-benar mendukung.

“Saya kira harga tanah di sini belum begitu mahal, pemerintah harus membayar lahan sesuai dengan harga yang berlaku saat ini. Untuk mempercepat pembelian masyarakat juga jangan serta merta menaikkan harga tanah karena ada perluasan bandara,” tandas politisi Partai Demokrat ini. ■ rh/sf



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis (Kiri). Foto: Chasbi/hr

TIP Jalan Tol Berpotensi Kembangkan Ekonomi Daerah



Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Idham Samawi. Foto: Azka/hr

Anggota Komisi V DPR RI Mohammad Idham Samawi menilai pemanfaatan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau *rest area* jalan tol selama arus mudik dan balik berpotensi mengembangkan ekonomi daerah. Menurut data yang ia peroleh, potensi transaksi pemudik selama Lebaran 2019 nanti mencapai Rp 10,3 triliun untuk dibelanjakan di lokasi mudik dan Rp 6 triliun untuk urusan transportasi. Potensi belanja ini harus dimanfaatkan oleh daerah yang dilalui Tol Trans-Jawa.

“Salah satunya dengan menyiapkan fasilitas area istirahat di kota dan kabupaten tersebut. Pemerintah daerah juga harus aktif menyasar warga untuk berdagang menjajakan apa yang menjadi ciri khas tiap daerahnya yang dilalui jalan tol tersebut,” tutur Idham saat ditemui Parlementaria sesaat sebelum Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

”

DAERAH YANG DILALUI JALAN TOL BIASANYA DAPAT MENJADI AREA ISTIRAHAT. INI AKAN MENJADI PELUANG BAGI DAERAH UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI LOKAL.

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, pemudik akan merencanakan pilihan daerah yang hendak dijadikan tempat istirahat saat mudik nanti. Daerah yang dilalui jalan tol biasanya dapat menjadi area istirahat. Ini akan menjadi peluang bagi daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal.

“BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) juga mesti aktif mengedukasi masyarakat dan pemudik untuk beristirahat di luar jalan tol atau di daerah yang dilalui jalan tol. Operator jalan tol juga harus menyiapkan

sistem yang membuat pemudik tak perlu membayar saat keluar-masuk di salah satu pintu Tol Trans-Jawa untuk istirahat di salah satu daerah,” ucapnya.

Hal ini, terang politisi dapil Di Yogyakarta itu, penting untuk mendorong pemudik memanfaatkan daerah yang dilalui jalan tol sebagai tempat istirahat dan menghindari macet di dekat *rest area*.

Potensi kemacetan berupa antrian kendaraan masuk *rest area* bisa terjadi, sehingga pemerintah sebaiknya mewaspadaikan potensi itu untuk dicarikan jalan keluarnya.

“Ini yang harus kita waspadai bersama pemerintah, dan asih ada waktu untuk diperbaiki. Karena area untuk istirahat pemudik dekat dengan pintu tol, area untuk istirahat bagi pengguna jalan tol sebaiknya berjarak 200-300 meter dari pintu tol. Sejumlah *rest area* tidak akan mencukupi kebutuhan pemudik yang akan singgah,” tukas Idham. ■ **er/sf**

Legislator Nilai Ada Oknum Swasta Ingin Kuasai Garuda

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Dzubir menilai ada oknum yang ingin mengakuisisi saham mayoritas PT. Garuda Indonesia Airlines (PT. GIA). Imbasnya menciptakan kegaduhan di media massa beberapa waktu lalu terkait permasalahan laporan keuangan PT. GIA tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa laporan keuangan Garuda masih dalam kategori baik dan tidak ditemukan upaya *window dressing*.

Hal tersebut ia sampaikan sesuai melaksanakan rapat dengan Direksi PT. GIA, Pelindo III, dan Angkasa Pura I di Provinsi Bali, Kamis (2/5), dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Dito Ganinduto (F-Golkar). Inas meminta agar kegaduhan ini harus segera diselesaikan oleh internal Garuda supaya tidak menimbulkan efek

ketidakpercayaan di masyarakat.

“Laporan keuangannya bagus, bukan hasil rekayasa. Bahwa ternyata ada piutang yang dijadikan pendapatan, itu kan sesuai dengan PSAK (Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 23, jadi dibenarkan dalam PSAK Nomor 23. Yang menjadi persoalan bagi saya adalah kenapa ini diributkan oleh komisaris. Harusnya komisaris sebagai wakil dari pemegang saham menjaga kredibilitas Garuda, jangan dibuat ribut dan dipolemikkan di media massa,” tegasnya.

Politisi Partai Hanura tersebut mencurigai bahwa ada upaya kecurangan dari swasta pemegang saham mayoritas dan minoritas untuk menguasai bersama saham mayoritas Garuda. Ia berharap, suara rakyat Indonesia tidak tergerus oleh upaya permainan oknum swasta tersebut, karena selama ini menurutnya suara rakyat masih menjadi dominan dalam

setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Ini saya kira oknum, karena swasta mau berbisnis sah-sah saja mau bermain apapun untuk menguasai Garuda. Saya harap pemerintah RI jangan mau kalah. Jangan sampai 60,5 persen itu nanti malah hilang. Yang kita lihat bahwa ada keinginan dari pemegang saham minoritas mayoritas itu yang selama ini di setiap RUPS selalu kalah suara dengan RI. Nah bagaimana mereka ingin menguasai suara itu,” imbuhnya.

Inas menambahkan, bahwa saat ini pihak swasta tersebut telah memiliki saham sebesar 31 persen Garuda. “Sisa 4 persen hingga nanti mereka dapat memiliki posisi *bargaining* dengan pemerintah. Nah ini yang harus kita jaga agar upaya tersebut tidak tercapai. Pemerintah Indonesia tetap harus di atas,” tegas legislator dapil Banten III itu. ■ **er/sf**



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Dzubir (Kanan). Foto: Erlangga/hr

Sinergi BUMN Diharap Tingkatkan Pembangunan Negara

Anggota Komisi VI DPR RI Hardisoesilo mengharapkan antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menciptakan sinergi guna kepentingan pembangunan negara. Meskipun demikian, menurutnya membangun sinergi tidaklah mudah, saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi para BUMN.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja dari Kementerian BUMN, Kemenprin, BKPM, dan beberapa BUMN, PT Semen Padang, PT. Pelindo II, PT. Bukit Asam, serta PT Utama Karya, Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/5).

“Contoh misalnya Utama Karya. Dulu kan kerjanya bikin rumah sakit. Sekarang dengan transformasi perusahaan dengan mendapat PNM tidak hanya membangun jalan tol, tapi juga sebagai properti. Jadi investor. Itu kan membutuhkan transformasi yang besar,” papar politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu.

Menurutnya, meskipun di masing-masing BUMN terdapat masalah, namun Komisi VI DPR RI telah berusaha memberikan solusi yang konstruktif. “Yang pertama soal Pelindo, kita berharap Pelindo dengan Semen Padang mengadakan negosiasi terkait volume pekerjaan, sehubungan telah membangun dermaga baru, ataupun tentang tarif di antara mereka. Mereka berjanji akan bertemu dan akan menyampaikan ke Komisi VI,” jelas Hardisoesilo.

”

...MESKIPUN DI MASING-MASING BUMN TERDAPAT MASALAH, NAMUN KOMISI VI DPR RI TELAH BERUSAHA MEMBERIKAN SOLUSI YANG KONSTRUKTIF.

Masalah lain ada juga aset-aset yang sebetulnya bisa diselesaikan karena mangkrak. Ia mencontohkan sekarang sudah tidak ada pelayaran Pelni dari Teluk Bayur ke berbagai tempat, kini yang ada ke Mentawai

saja. “Nah Gedung Pelni itu mangkrak *enggak* karuan, jelek. Apa susahnya BUMN sama BUMN menyelesaikan masalah itu. Kita jembatani, kami minta Menteri BUMN bisa menyelesaikan,” ungkap Hardisoesilo.

Hal lain ia mempertanyakan Bukit Asam yang tidak mendapatkan batu bara dengan kualitas baik. “Masalahnya kenapa kita tidak bisa mendapatkan batu bara yang gradenya tinggi, yang kalorinya di atas 7 ribu. Sehingga bisa membuat listrik itu menjadi lebih efisien. Nah setelah kita diskusikan ada kesepakatan, mereka akan melakukan rekonsolidasi khususnya Bukit Asam terhadap Semen Padang,” jelas Hardisoesilo. ■

eko/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Hardisoesilo. Foto: Eko/sf

Keberadaan Bandara NYIA Berpotensi Tingkatkan Perekonomian Masyarakat



Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Erman/hr

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo mengatakan keberadaan Bandar Udara (Bandara) New Yogyakarta International Airport (NYIA) memiliki potensi yang luar biasa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Ia juga melihat adanya potensi *direct flight* (penerbangan langsung) dari luar negeri yang cukup menjanjikan di bandara yang memiliki luas lebih dari 500 hektar ini.

"Suatu pengharapan kedepannya bahwa dengan Bandara Internasional Yogyakarta yang baru ini bisa memberikan dampak meningkatnya kunjungan pariwisata ke Jawa Tengah,

Yogyakarta dan sekitarnya," kata Sartono usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait pengembangan wisata di kawasan Joglosemar di Bandara NYIA, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (02/5).

Diketahui, Menteri Badan Usaha milik Negara (BUMN) sendiri telah meresmikan sinergi BUMN yaitu spirit Joglosemar dengan melibatkan 12 BUMN. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam rangka turut mendukung akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional serta mendorong tumbuh kembangnya pariwisata di kawasan Joglosemar.

Legislator Partai Demokrat ini menambahkan dengan meningkatnya

kunjungan wisatawan, tidak hanya masyarakat perkotaan saja namun yang berada di pedesaan dapat merasakan tumbuh kembangnya perekonomian. "Kita sudah bahas tentang Borobudur, daerah pedesaan sekitar Borobudur juga sekarang merasakan dampak yang positif yang tentu saja menunjang perekonomian mereka," tambah Sartono.

Ia menekankan siapapun kepala daerahnya, termasuk juga menteri bahkan presidennya nanti, pembangunan kawasan Joglosemar harus berkelanjutan. Mengingat antusiasme dari masyarakat yang cukup tinggi untuk menjadikan kawasan Joglosemar sebagai branding baru kepariwisataan nasional.

Sebelumnya, Deputi bidang Usaha Energi, Logistik dan Kawasan dan Pariwisata (ELKP) Kementerian BUMN Edwin Abdullah memaparkan bahwa Joglosemar merupakan amanat Presiden Joko Widodo yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015. Pengembangan Joglosemar tidak pernah lepas dari social development, dimana masyarakat sangat mendukung akan pariwisata di daerahnya.

"*Community base on tourism* sudah ada di desa-desa, mereka telah disiapkan dan untuk melatih masyarakat sejak 2017 dan sudah dilaksanakan sebanyak 132 titik. "Masyarakat lokal dilatih untuk mengelola pariwisata oleh PT. TWC (Taman Wisata Candi) Patra Jasa yang bekerjasama dengan BUMDes. Karena tidak mungkin pendekatan teknografis tanpa melibatkan masyarakat," tandas Edwin. ■ es

Komisi VII Dorong Percepatan Pembangunan *Smelter* Freeport

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendorong agar pembangunan *smelter* PT. Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) Gresik, Jawa Timur pada tahun ini harus dapat mencapai target sebesar 30 persen. Ia menjelaskan bahwa DPR RI akan mengambil langkah tegas kepada pemerintah dan PT. Freeport Indonesia jika tidak bisa menyelesaikan target pembangunan tahun ini.

“Kalau belum mencapai 30 persen, maka DPR melalui Komisi VII akan memberikan teguran kepada pemerintah agar melakukan penghentian produk-produk ekspor yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia ini,” tegas Ridwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau langsung kawasan pembangunan

smelter PT. Freeport Indonesia di JIPE Gresik, Jawa Timur, Selasa (30/4).

Menurut politisi Partai Golkar itu, pembangunan *smelter* ini sudah tertunda cukup lama karena beberapa hal, seperti penentuan lokasi pembangunan *smelter* yang berubah-ubah. Hingga Februari 2019, progres pembangunan *smelter* di JIPE Gresik baru mencapai 3,86 persen. Oleh karena itu, Ridwan menegaskan Komisi VII DPR RI akan terus mengawasi jalannya proses pembangunan *smelter* dari proses perencanaan, hingga nanti *smelter* diresmikan.

“Kami harus tegas karena ini sudah tertunda-tunda cukup lama. Nah dalam waktu 2019 sampai November ini prestasi harus 30 persen. Jadi bukan fisik saja, tetapi perencanaan itu kita ikut, termasuk investasi tanah



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Foto: Natasya/hr

dan lainnya. Nah kalau sudah 30 persen dan tanah ini sudah selesai diuruk semuanya 18 bulan. Tapi fase pertama yang kita tempati sekarang itu diharapkan dalam waktu 6 bulan sudah selesai dan sudah bisa dipasang tiang pancang,” jelasnya. ■ as/mh

Tambahan 10 Ribu Kuota Haji Hasil Diplomasi yang Panjang

Penambahan kuota Haji tahun ini sebanyak 10 ribu jemaah merupakan hasil dari diplomasi politik yang panjang oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher mengingatkan, penambahan kuota Haji ini harus segera diikuti

dengan persiapan teknis dan legalitasnya.

Sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5), Ali mengatakan DPR RI sendiri telah mendesak Menteri Agama agar menyiapkan langkah-langkah strategis tahun ini terkait penambahan kuota Haji tersebut. Dari aspek legalitas, Pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan nota diplomatik soal penambahan kuota. Aspek legalitas seperti ini harus disambut dengan baik.

Sementara persiapan aspek teknis dari penambahan kuota ini adalah pemondokan dan asrama haji, baik di Tanah Air maupun selama berada di Mekkah dan Madinah. Dengan penambahan 10 ribu jemaah Haji, butuh penambahan kapasitas pemondokan pula. Itu yang perlu segera disiapkan dari penyelenggaraan Haji tahun ini. Dari aspek anggaran, sebut Ali, ada banyak



...DPR RI SENDIRI TELAH MENDESAK MENTERI AGAMA AGAR MENYIAPKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TAHUN INI TERKAIT PENAMBAHAN KUOTA HAJI TERSEBUT.

penghematan yang sudah dilakukan DPR RI dan pemerintah.

“Dari aspek anggaran memerlukan dana kurang lebih Rp 350 miliar. Dana itu dapat penghematan dari akomodasi di Mekkah dan Madinah sekitar Rp 50 miliar. Penghematan dari pengadaan uang riyal kurang lebih Rp 60 miliar. Penghematan lain-lain kurang lebih Rp 50 miliar. Sisanya Rp 185 miliar dibebankan kepada APBN. Ini jadi tanggung jawab Kemenag dan Kemenkeu,” jelas politisi PAN tersebut, seraya menambahkan, penambahan 10 ribu jemaah hanya untuk program Haji regular. ■ mh/mh



Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher. Foto: Jaka/hr

Komisi IX Dorong BLK Bali Sesuaikan Perkembangan Teknologi



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI meninjau fasilitas BLK Bali. Foto: Andri/hr

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI mengapresiasi Balai Latihan Kerja (BLK) Bali, karena memiliki program yang berjalan dengan baik. Namun beberapa peralatan praktek masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal. Tim Kunker mendorong BLK Bali untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0.

"Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Untuk itu peralatan dan teknologi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar agar tidak ketinggalan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Julianus Pote Leba saat mengikuti Kunker Komisi

IX DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat (3/5).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM) di BLK pun perlu mendapatkan pelatihan, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Kegiatan pelatihan yang dilakukan itu harus bisa mencetak tenaga kerja yang mampu bersaing dengan pekerja lainnya.

Ia menilai kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri saat ini. BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar diminta terus memperbaiki diri menghadapi perkembangan jaman. Terlebih, menurut Julianus, pengembangan SDM untuk menghadapi era industri 4.0.

Data Kementerian Ketenagakerjaan

menyebutkan BLK milik pemerintah berjumlah 514, sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189. Di tingkat nasional, Kemenaker akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada tahun 2019. Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030.

Julianus mengingatkan, bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi dan jadi keuntungan bagi negara, bukan malah menjadi beban. Untuk pembangunan BLK Komunitas ini harus sejalan dengan perturan perundang-undangan untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp 1 triliun, sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp 1 miliar.

Sementara menurut data Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali per Agustus 2018 jumlah penduduk usia kerja di Bali mencapai 3.288.908 orang, dari penduduk usia kerja tersebut 76,78 persen (2.525.355 orang) merupakan angkatan kerja dan 23,22 persen (763.563 orang) merupakan bukan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2018 di Bali mencapai 1,37 persen, hal ini mengalami penurunan 0,11 poin dibandingkan TPT Agustus 2017 (1,48 persen) atau mengalami kenaikan 0,51 poin dibandingkan dengan TPT Februari 2018 (0,86 persen). ■ man/sf

Komisi IX Dorong BLK Bitung Fokus Pelatihan Sektor Perikanan



Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI meninjau BLK Bitung, Sulut. Foto: Sofyan/itr

Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir mendorong Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara untuk fokus pada pelatihan tenaga kerja berbasis sektor perikanan. Pasalnya ia melihat potensi perikanan di Sulut cukup tinggi. Harapannya, sektor perikanan yang sudah berjalan akan semakin maksimal.

“Kita lihat BLK Bitung bagus, tapi Komisi IX menyarankan karena di sini potensinya perikanan, jadi bisa fokus ke perikanan. Bisa dikembangkan ke (pelatihan mesin) kapal nelayan atau (pengadaan) cool storage untuk mendukung sektor perikanan,” kata Ali usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau BLK Bitung, Sulut, Kamis (2/5).

Politisi Partai NasDem ini menilai, dengan adanya penambahan alat praktik di BLK Bitung untuk sektor perikanan, sehingga masyarakat yang mendapat pelatihan dapat lebih pandai memaksimalkan potensi perikanan yang ada di Sulut. Ia mendorong untuk memperbanyak pelatihan di sektor perikanan.

“Sesuaikan (alat praktik dan pelatihan) dengan pasar kerja. Peluang kerja di bidang perikanan cukup tinggi. Kita kan goal-nya mereka yang dilatih bisa bekerja di masyarakat dan bisa berkembang. Kalau revolusi industri 4.0 kita belum melihat sejauh apa. Tapi kalau dilihat dari kesiapan industri sudah cukup,” analisa legislator dapil Jawa Tengah II itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Handayani (F-PKB) menilai, alat praktik bidang otomotif yang dimiliki BLK Bitung

”

...DENGAN ADANYA PENAMBAHAN ALAT PRAKTIK DI BLK BITUNG UNTUK SEKTOR PERIKANAN, SEHINGGA MASYARAKAT YANG MENDAPAT PELATIHAN DAPAT LEBIH PANDAI MEMAKSIMALKAN POTENSI PERIKANAN YANG ADA DI SULUT.

sudah cukup bagus, canggih, dan sesuai tren teknologi mobil dan motor pada zaman sekarang. Namun ia melihat perlu adanya penambahan jenis-jenis mesin. Sehingga perlu adanya penambahan anggaran untuk revitalisasi BLK ini.

“Mobilnya hanya ada 2 jenis, Avanza dan Xenia, mungkin bisa dilengkapi kendaraan yang banyak di daerah ini. Misalnya Innova dan lainnya. Itu kan mesinnya berbeda. Motor juga berbeda. Harus mengikuti tren yang banyak digunakan masyarakat, jadi selesai pelatihan mereka dapat bekerja di bengkel-bengkel di sini,” jelas legislator dapil Jambi itu.

Dalam Kunker yang dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso (F-Gerindra) itu, Tim Kunker Komisi IX DPR RI meninjau sejumlah fasilitas yang dimiliki BLK Bitung dan menggelar pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut Erny Tumundo, serta pihak terkait lainnya. ■ sf

Budaya Melayu Perlu Dikembangkan untuk Pariwisata Batam

Pengembangan budaya melayu sangat penting untuk pengembangan sektor pariwisata di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Di provinsi inilah pusat kebudayaan melayu tumbuh. Bahkan, budaya melayu telah menyebar ke negeri jiran, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti kunjungan kerja ke Batam, Kepri, Kamis (2/5). “Kepulauan Riau ini merupakan salah satu pusat kebudayaan melayu. Saat ini sudah tersebar sampai ke Malaysia, Singapura, Brunei, Sumatra, dan sebagian Kalimantan yang masih merupakan rumpun kebudayaan melayu. Kebudayaan melayu ini perlu dipromosikan agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengenal,” jelas Nuroji.

Nuroji mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kepri, agar membuat *event* budaya melayu untuk menciptakan daya tarik bagi para wisatawan sekaligus mempromosikan kebudayaan melayu. “Dari mulai bahasa, tari, kuliner, adat istiadat, seni, hingga pakaian, jadi unsur budaya melayu yang harus ditampilkan dalam *event* tersebut,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga berkunjung ke Infinite Framework Studio (IFW) yang merupakan industri pembuatan film animasi terbesar di Asia yang berada di Kota Batam. “Sekarang IFW masih memproduksi karya *by order* dari luar negeri, seperti Filipina, Hongkong, ataupun Hollywood. Oleh karena itu, Komisi X mendorong IFW ini agar menjadi produsen, terutama untuk karya-karya dalam negeri,” kata Nuroji.



Anggota Komisi X DPR RI Nuroji. Foto: Icha/hr

”

KEPULAUAN RIAU INI MERUPAKAN SALAH SATU PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU. SAAT INI SUDAH TERSEBAR SAMPAI KE MALAYSIA, SINGAPURA, BRUNEI, SUMATRA, DAN SEBAGIAN KALIMANTAN YANG MASIH MERUPAKAN RUMPUN KEBUDAYAAN MELAYU.

Komisi X DPR RI mendorong IFW untuk terus meningkatkan perannya menciptakan karya dari dan untuk Indonesia, mengingat tayangan animasi maupun film, juga dapat menjadi salah satu wadah untuk mensosialisasikan budaya Bangsa Indonesia.

Melihat karya ekonomi kreatif lainnya, Komisi X DPR RI juga mengunjungi pengrajin usaha kecil di Batam. Nuroji memaparkan bahwa masih perlu bantuan teknis untuk meningkatkan hasil produksinya. “Ide kreatifnya sudah baik, hanya finishing-nya saja yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih menarik dan memiliki daya jual yang tinggi,” harap Anggota DPR RI dapil Jawa Barat VI itu. ■ **ica/mh**

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Perlu Ditingkatkan

Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Suryo Alam menyatakan bahwa diperlukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar keduanya bisa saling bersinergi dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi dan kinerjanya.

“Hal ini supaya pemerintah daerah dapat mengetahui program apa saja yang sedang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, pemerintah pusat bisa mengetahui permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah,” ujar Suryo Alam di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/5).

Terkait bidang pendidikan tinggi di

Sumbar, Suryo mengatakan, saat ini lebih banyak diperlukan Beasiswa Bidikmisi, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk praktik agar kemampuan mahasiswa yang ada di berbagai universitas di Sumbar bisa sama baiknya dengan mahasiswa yang ada di Pulau Jawa.

“Kunjungan Kerja Komisi X DPR ini bukan menjadi bagian dari persiapan penyusunan APBN 2020, tetapi lebih melihat persoalan pada lima tahun yang akan datang, supaya persiapannya lebih pas, tidak secara parsial tetapi secara keseluruhan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dikatakannya, Komisi X DPR RI juga berupaya mendorong dan memperkuat sektor pariwisata yang ada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumbar,



Anggota Komisi X DPR RI Mohamad Suryo Alam. Foto: Dep/od

agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar bisa diandalkan untuk bidang pariwisata. “Oleh karenanya dalam kunjungan kerja ini, kami juga mengajak mitra kerja kami di pusat untuk melihat dan mendengarkan langsung persoalan-persoalan yang ada di sini,” pungkasnya.

■ dep/mh

Dikotomi Sekolah Swasta dan Negeri Harus Dihapuskan

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan berharap dikotomi dalam pelaksanaan sistem pendidikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri harus dihapuskan. Menurutnya, selama ini sebenarnya sistem pendidikan Indonesia sudah menghapuskan dikotomi atau yang membedakan antara sekolah swasta dan negeri, yakni lewat sistem akreditasi. Sayangnya, dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemui dikotomi tersebut.

“Contohnya adalah kesempatan yang diberikan beberapa perguruan tinggi negeri untuk siswa sekolah swasta jauh lebih sedikit dibanding sekolah negeri. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap Sofyan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5).

Dijelaskan politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, sistem akreditasi memberikan standarisasi yang

”

...SISWA DARI SEKOLAH NEGERI ATAU SWASTA MEMILIKI KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MASUK UNIVERSITAS TERSEBUT LEWAT JALUR REGULAR ATAU UMUM.

sudah diatur sedemikian rupa bagi sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri. Sehingga jika satu sekolah swasta memiliki nilai akreditasi yang sama dengan satu sekolah negeri, maka kedua sekolah tersebut sudah dipastikan memiliki standar yang sama.

Dengan demikian, masih kata Sofyan, seharusnya pelajar memiliki hak yang sama untuk ikut bersaing dalam tes masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur khusus. Namun, pada kenyataannya pelajar dari sekolah



Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan (kiri). Foto: Ayu/hr

swasta tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur khusus sebagaimana sekolah negeri.

“Saya malah lebih menyukai sistem yang diterapkan oleh UGM (Universitas Gadjah Mada) yang meniadakan jalur khusus. Artinya semua siswa dari sekolah negeri atau swasta memiliki kesempatan yang sama untuk masuk universitas tersebut lewat jalur reguler atau umum. Ini menjadi lebih *fair* dan adil,” analisa legislator dapil Sumut I itu. ■ ayu/sf

Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa Ditekan

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan tanggapannya mengenai rencana pemindahan ibu kota Negara Indonesia ke luar Pulau Jawa dengan menekan anggaran belanjanya. Ia menuturkan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota baru, pembiayaannya bisa ditekan atau diminimalisir.

Ia menyebut gedung-gedung pemerintahan yang akan ditinggalkan di Jakarta bisa diserahkan penggunaan dan pengelolannya kepada swasta. Selanjutnya, kata Misbakhun, pihak swasta yang menggunakan gedung-gedung milik negara di Jakarta diwajibkan membangun kantor-kantor pemerintahan di ibu kota baru.

"Ketika ibu kota negara sudah dipindah ke lokasi baru, pembangunan

untuk gedung-gedung dan fasilitas pemerintahan bisa dilakukan dengan nol rupiah. Artinya, pembangunan gedung pemerintahan di lokasi baru tanpa membebani APBN. Jadi swasta membangun gedung pemerintahan di ibu kota baru RI sebagai biaya sewa penggunaan gedung-gedung negara di Jakarta," ujar Misbakhun kepada Parlemen, Rabu (8/5).

Skema penggunaan dan pengelolaan lahan ataupun gedung milik pemerintah kepada swasta tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, lahan dan gedung tetap milik pemerintah sepenuhnya. "Nantinya swasta yang mendapatkan hak pengelolaan diwajibkan membangun gedung perkantoran dan semua fasilitas pendukung yang diperlukan di ibu kota baru. Mereka diberi hak selama 50 tahun



Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto: Andri/hr

yaitu dua kali periode HGB," tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini menyebut skenario tersebut bisa dilakukan sebab pemerintah dan swasta sama-sama diuntungkan. "Karena Jakarta masih tetap sebagai ibu kota perekonomian dan swasta butuh perkantoran. Nantinya kelebihan biaya dari pemberian hak kepada swasta akan menjadi PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak)," tuturnya. ■ **hs/sf**

Indonesia - Peru Diharapkan Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sarmuji mengatakan, Peru merupakan pasar penting bagi Indonesia, namun saat ini kerja sama ekonomi kedua negara belum mencerminkan potensi yang ada. Karenanya, kedatangan delegasi Parlemen Peru ke DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama bidang ekonomi kedua negara.

Demikian diungkapkan Sarmuji saat menerima kunjungan delegasi Kongres Peru yang dipimpin Ketua Liga Persahabatan Parlemen Indonesia - Peru Gilmer Trujillo Zeggara di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu membahas peningkatan kerja sama antar kedua negara, baik di bidang

ekonomi, pariwisata, perdagangan maupun antar parlemen.

"Di sektor perdagangan kita harapkan tumbuh terus perdagangan Indonesia dengan Peru, misalnya keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain yang bisa disuplai ke Peru, ataupun sebaliknya keunggulan Peru yang tidak bisa disuplai oleh negara lain ke Indonesia itu apa. Ini perlu dipetakan," ujar Sarmuji.

Diketahui, Peru merupakan mitra dagang ke-4 terbesar bagi Indonesia. Volume perdagangan Bilateral Indonesia - Peru menunjukkan tren positif. Di tahun 2017, total perdagangan kedua negara mencapai 230 juta dollar Amerika Serikat (AS), dan pada tahun 2018 meningkat mencapai 278,5 juta dollar AS.

Selain sektor perdagangan,



Anggota BKSAP DPR RI Sarmuji. Foto: Jaka/hr

politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong peningkatan di sektor investasi, mengingat jarak menjadi salah satu tantangan dalam perdagangan kedua negara. "Sementara, investasi bebas kendala jarak dan mekanisme distribusi yang mahal, jadi investasi kita harapkan bisa meningkat antara Indonesia dan Peru," jelas Sarmuji. ■ **ann/sf**

Setjen DPR dan USINDO Jalin Kerja Sama Penguatan Kapasitas *Building*

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi Kepala Pusat Perancangan Perundang-Undangan Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Syamsul serta Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI Nanik Herry Murti menerima kunjungan Ketua United States – Indonesia Society (USINDO) J. Stapleton Roy. Kedua belah pihak membicarakan kerja sama untuk penguatan kapasitas *building* di DPR RI.

“Nah untuk itu dia mengundang perancang maupun tenaga ahli dari Dewan di Indonesia, sebanyak delapan orang untuk penguatan kapasitas di Washington. Dia ke sini untuk memastikan kriteria-kriteria dari tenaga ahli Dewan ini yang dikirim ke Washington. Jadi kita bicara soal kriteria,” ungkap Indra usai pertemuan dengan Ketua USINDO di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

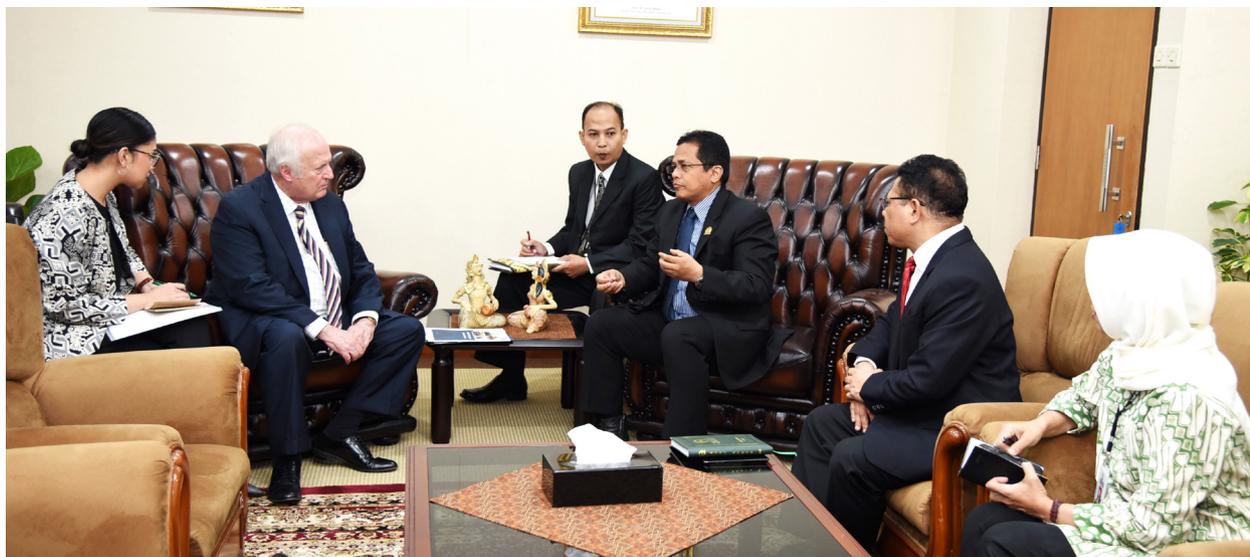
USINDO mempunyai konsen dan komitmen untuk membantu Parlemen Indonesia dalam berbagai hal, untuk periode ini USINDO akan fokus pada bidang energi. USINDO merupakan organisasi non-pemerintahan yang secara eksklusif berdedikasi untuk meningkatkan pemahaman Amerika Serikat tentang Indonesia, pengertian Indonesia tentang Amerika Serikat, dan memperkuat hubungan di antara kedua negara dan penduduknya.

Indra menjelaskan penguatan kapasitas *building* akan melibatkan unsur tenaga ahli dan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Mereka menjadi tulang punggung untuk mempelajari draf RUU atau naskah akademik. *Short course* bukan sekolah dalam jangka waktu yang lama, sekolah dalam dua tiga minggu. Tapi mempelajari dasar-dasar perancangan undang-undang yang berkaitan dengan energi,” papar Indra.

Indra menjelaskan, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI akan membuka seleksi kepada para tenaga ahli dan peneliti yang memiliki konsen dan kemampuan dasar tentang perancangan undang-undang maupun energi untuk mengikuti seleksi, dan nanti akan diundang ke Washington untuk mengikuti *short course*.

Saat ini DPR sedang merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas, RUU Mineral dan Batu Bara, serta RUU Energi Baru dan Terbarukan. Menurut Indra tiga hal tersebut menjadi perhatian USINDO.

“Mereka akan membantu tenaga ahli-tenaga ahli mendalami dan membuka wawasan perancang tentang bagaimana sebuah RUU energi. Jadi bukan hanya energi baru terbarukan, termasuk juga migas dan minerba pun mereka akan membantu, mengasistinsi tenaga ahli kita,” pungkas Indra. ■eko/sf



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerima kunjungan Ketua United States – Indonesia Society (USINDO) J. Stapleton Roy. Foto: Odjie/hr

Ittama DPR Berikan Bimtek Pelaksanaan PMPRB

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengundang perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) untuk memberikan bimbingan teknis dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LEK) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

“Pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari sosialisasi peraturan MenPAN-RB tentang LKE PMPRB. Ada perbedaan dalam pelaksanaan PMPRB tahun ini, makanya kita mengundang pihak dari KemenPAN-RB untuk memberikan bimtek,” ungkapnya usai memimpin bimtek kepada seluruh jajaran Inspektorat Utama DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

Tahun ini, lanjut Totok, sapaan akrabnya, pelaksanaan PMPRB dilakukan tidak hanya di unit organisasi, tetapi melibatkan unit eselon satu yang nantinya akan di kombinasi dengan Kesetjengan dan Badan Keahlian DPR RI.

“Biasanya hanya unit organisasi saja, tapi saat ini pelaksanaan PMPRB melibatkan eselon satu yaitu Badan Keahlian, Inspektorat Utama, Deputi Administrasi dan Deputi Persidangan. Makanya Ittama mengundang KemenPAN-RB untuk memberikan bimtek,” jelas Totok.

Selain itu, pihaknya juga diminta melakukan survei yang *assessment*-nya dari pihak luar. Pertama, di Bagian Arsip yang *assessment*-nya dilakukan oleh ANRI, kedua di IACM yang *assessment*-nya dilakukan oleh BPKP. Ketiga, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

“Semuanya ini adalah zona integritas yang hasilnya harus mencapai 100 persen. Tahun lalu indeks kita itu 72,71 persen. Tahun ini kita menargetkan dapat memenuhi syarat yaitu 75 persen,” harap Totok.

Penilaian ini, lanjut Totok akan berpengaruh terhadap kenaikan Tunjangan Kinerja yang akan diterima oleh ASN. Maka dari itu ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan nilai. “Langkah yang dilakukan adalah sosialisasi secara masif mengenai tugas dan fungsi serta ukuran nilai, kemudian pembinaan agar mereka paham apa kinerjanya dan ukurannya seperti apa,” tutup Totok. ■ rnm/sf



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Geraldilhr

DPRD Probolinggo Diminta Ikuti Aturan Bamus

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Djaka Dwi Winarko menyatakan, meskipun DPR RI dan DPRD merupakan lembaga perwakilan, namun memiliki perbedaan, salah satunya terkait pengaturan tugas, fungsi dan wewenang Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Oleh karenanya seluruh hal yang menyangkut hal tersebut harus memiliki aturan dasar hukumnya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kita sepakat, meskipun kita sama-sama lembaga perwakilan, ada perbedaannya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan, dan ada dasar hukumnya itu bisa dilaksanakan. Tapi yang penting itu sebetulnya, paling kita tekankan dan sudah disepakati semuanya harus ada dasarnya, harus ada aturannya,” katanya usai menerima konsultasi Anggota DPRD Kota Probolinggo, terkait tugas, fungsi dan wewenang Badan Musyawarah DPRD, di Ruang Biro Persidangan II Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5).

Hal itu mengemuka saat Anggota Bamus DPRD Kota Probolinggo menyampaikan fungsi dan wewenang Bamus DPRD terkait hak-hak yang didapatkan Anggota Bamus DPRD jika meninggal karena sakit. Djaka menjelaskan, untuk di DPR RI pada 6 bulan sebelumnya harus segera diusulkan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Sedangkan menyangkut hak terkait fasilitas, gaji pokok dan lain sebagainya, Djaka menilai itu dikembalikan dengan aturan yang ada di dalamnya.

“Yang pasti dan digunakan adalah UU MD3 dan Tata Tertib, karena DPRD



Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima konsultasi Anggota DPRD Kota Probolinggo. Foto: Ojje/hr

yang punya tatib. Sepanjang itu tidak dilarang atau tidak ada yang dilanggar dari aturan itu, maka Bamus sebagai salah satu AKD di DPRD bisa melakukan kebijakan-kebijakan, tapi koridornya tetap harus ada di koridor hukum. Kalau itu tidak ada larangan, sebetulnya bisa saja dimusyawarahkan. Karena kalau terkait dengan masalah-masalah yang internal, ini kan agak berbeda,” ungkap Djaka.

Djaka juga menambahkan, perbedaan lainnya terkait keberadaan AKD Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di DPR RI. Salah satu tugas BURT adalah menyusun Arah Kebijakan Penggunaan Anggaran (AKUPA), sedangkan AKD itu di DPRD Kota Probolinggo tidak ada. “Jadi mungkin Bamus sebagai AKD bisa saja merumuskan kebijakan-kebijakan itu dengan prinsip yang paling utama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkask Djaka.

Sementara Ketua DPRD Kota

Probolinggo Rudi Gofur mengatakan, jika mengacu kepada aturan yang ada di DPR RI bahwa PAW diajukan 6 bulan sebelumnya, maka bagi Anggota DPRD Probolinggo yang telah meninggal sebelumnya tidak dapat memproses hal tersebut. Mengingat bulan Agustus mendatang merupakan akhir masa jabatan bagi Anggota DPRD periode 2014-2019, sehingga hak-hak dan segala ketentuan yang menjadi hak bagi Anggota DPRD yang meninggal tersebut disesuaikan dengan aturan Bamus DPRD.

“Bahwa Bamus bisa memberikan telaah, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya. Apabila ada hal-hal yang mengatur dan bisa, maka seyogyanya diberikan sampai dengan akhir masa jabatan per Agustus. Kalau itu tidak memungkinkan dan kemudian aturan tidak menyatakan demikian, maka langsung hari itu juga tidak bisa diterima tentang hak-haknya dia sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo,” tutupnya. ■ ndy/sf

Kuba Mitra **Strategis** Indonesia



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba Nirsia Castro Guevara. Foto: Kresno/hr

Indonesia memandang Kuba sebagai mitra strategis untuk saling mempromosikan kepentingan kedua negara di forum internasional. Keduanya saling mendukung baik tingkat *Government to Government* maupun *Parliament to Parliament*.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat menerima kunjungan Duta Besar Republik Kuba Nirsia Castro Guevara di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

“Suatu kehormatan bagi kami di BKSAP dapat berdiskusi dan bertukar pandangan. Saya yakin bahwa pertemuan hari dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin sejak 1960,” ungkap Dave.

Dalam kesempatan tersebut, Dave juga menyampaikan agenda kunjungan diplomasi BKSAP ke Kuba dalam waktu dekat ini. Menurutnya, ada beberapa sektor yang berpotensi untuk peningkatan hubungan kerja sama kedua negara, misalnya sektor kesehatan.

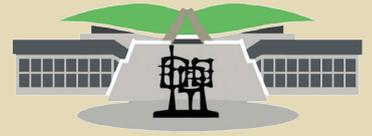
Seperti diketahui, Kuba menjadi salah negara yang memiliki sistem layanan kesehatan terbaik di dunia. Kuba berhasil mempertahankan angka kematian bayi di bawah lima dari seribu kelahiran. Selain itu, vaksin di Kuba juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Anggota Komisi I DPR RI menambahkan, pihaknya juga menyambut baik *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia-Kuba di bidang kesehatan yang telah disepakati di sela-sela pertemuan

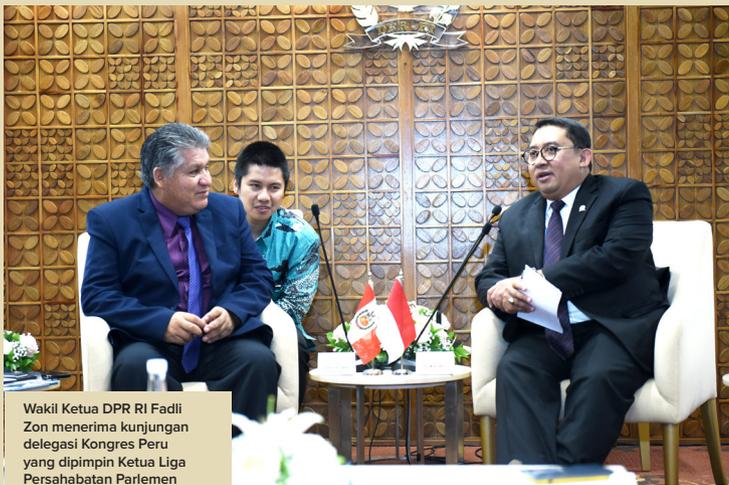
World Health Assembly ke-70 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, baru-baru ini.

Lebih lanjut Dave berharap kedua negara dapat meningkatkan kerja sama untuk memberantas HIV dan sifilis. Seperti diketahui pada tahun 2015 Kuba mendapatkan penghargaan dari World Health Organization (WHO) sebagai negara pertama yang berhasil memberantas penularan HIV dan sifilis dari ibu ke anak.

Selain kesehatan, cabang olahraga tinju Kuba juga dianggap salah satu terbaik di tingkat Olimpiade. “Karenanya, khusus untuk kunjungan nanti kita akan melihat sejauh mana perkembangannya. Sehingga kita bisa mendorong masing-masing pemerintah untuk meningkatkan hal-hal yang diperlukan,” sambung politisi F-Golkar ini. ■ **ann/sf**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengikuti Musyawarah Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Musrenbangnas) 2019 yang dibuka Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Kamis (9/5).
Foto: Dok/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan delegasi Kongres Peru yang dipimpin Ketua Liga Persahabatan Parlemen Indonesia - Peru Gilmer Trujillo Zeggara di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5)
Foto: Jaka/hr



Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholidia Indrayana menerima Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur di Ruang Kepala Biro Persidangan II, Senayan, Jakarta, Jumat (10/5).
Foto: Gerald/hr

